

INDONESIA NET-ZERO SUMMIT 2023

“It’s Now or Never!”

Sabtu, 24 Juni 2023

Djakarta Theater XXI, Jakarta

Sesi O4

“Melindungi Indonesia Emas 2045: Kenapa Aksi Iklim itu *Now or Never!*”

Dr. Dino Patti Djalal, Moderator:

Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Pak Alue. Seperti yang saya tanyakan ke Pak Luhut, banyak sekali kebijakan baru yang diambil oleh Pemerintah dalam 2-3 tahun terakhir di bidang perubahan iklim dan lingkungan. Ada target yang ambisius sekarang — 2060 ‘*or earlier*’. Kita dari akar rumput mengharapkan ‘*or earlier*’ itu berarti 2050, atau bahkan suatu hari 2045. Saya yakin ini bisa tercapai karena ada kemajuan teknologi. Menurut Pak Alue bagaimana kita mencapai target 2060? Kalau di Eropa, target sudah diundang-undangan, sehingga harus dilakukan dan kalau tidak dilakukan merupakan sebuah pelanggaran undang-undang. Bagaimana kalau di Indonesia? Apa strategi kita mencapai *net-zero* 2060?

Alue Dohong, Ph.D., Panelis:

Pertama, komitmen kita terhadap pengendalian perubahan iklim global tidak boleh kita ragukan karena Indonesia telah berkomitmen dan ikut menandatangani *Paris Agreement*. Kemudian, *Paris Agreement* sudah kita ratifikasi lewat UU No. 16 tahun 2016. Kita juga sudah mengekspresikan komitmen kita di dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang menyatakan bahwa kita akan mengurangi emisi, dari awalnya 29% dengan usaha sendiri, dan 41%, pada tahun 2030. Pada September tahun lalu, Indonesia memperkuat lagi target pengurangan emisi. Jika dilihat saat ini, kita berencana mengurangi emisi dengan upaya sendiri hampir 31,89%. Jika diekuivalenkan, dengan persentase tersebut, kita akan mengurangi emisi sebesar 915 MtCO₂e *by 2030*. Kalau dibantu dengan *international assistance*, maka menjadi 43,20% atau setara dengan 1,2 GtCO₂e pada tahun 2030. Perlu diketahui bahwa *timeframe* NDC adalah 2020 sampai 2030, sedangkan *timeframe Paris Agreement* adalah 2015 sampai 2050.

Disamping NDC, kita juga mengajukan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR). Di dalam dokumen tersebut, kita menargetkan *net-zero* di tahun 2060 atau *sooner*. Caranya bagaimana? Paling tidak kita fokuskan di 5 sektor. Paling besar emisinya berada di sektor *forest and other land uses* (FOLU). Hampir 60% atau setara dengan 500 MtCO₂e yang kita kurangi pada tahun 2030. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dino, pada tahun 2050 nanti global akan mengurangi 36 GtCO₂e untuk mencapai *net-zero*. Kita sudah 0,5 atau 1 GtCO₂e hanya dari sektor *forestry*. Itu besar dan *it means a lot for the global*.

Sektor terbesar kedua adalah energi. Kalau kita lihat, 358 MtCO₂e harus kita kurangi dengan upaya sendiri atau setara hampir 0,5 GtCO₂e. Ini upaya-upaya besar yang kita perlu capai. Kemudian 3 sektor lainnya kecil, tapi juga penting untuk kita lakukan. Bagaimana untuk mengakselerasi hal tersebut? Tentu, *policy* harus sudah kita terapkan. Ada berbagai macam *policy*; ada energi baru terbarukan, ada *FOLU Net Sink 2030*. Kita harap dengan *FOLU Net Sink 2030*, emisi dari sektor *forest* bahkan kita menargetkan -140 MtCO₂e. Sektor energi kita harapkan menjadi penopang berikutnya sehingga capaian target kita lebih cepat. Itu yang paling penting.

Ini dari sisi *policy*. Target kita juga sudah punya. Sekarang, aksinya. *Care and awareness is not enough, but do it. Action is the most important out of it.* Sekarang saya tanya, dari semua ini, siapa yang pernah menanam pohon dalam hidupnya? Tadi, Pak Menko mengatakan, “*be yourself, jangan hanya menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, tapi mulailah dari diri sendiri.*” Dalam hidup saya, saya telah menanam lebih dari 20.000 pohon. Itu penting. *Do not ask other people to do it, but do it by yourself first.* Saya ingin adik-adik semua kalau bisa menanam satu atau dua pohon setiap tahunnya. Jadi, ini penting. *Do it and lead by example.*

Ketiga. Berdasarkan *roadmap* NDC kita, untuk mencapai target 29% saja membutuhkan Rp 4 ribu triliun investasi. Dari Rp 4 ribu triliun untuk mencapai NDC kita, Rp 3 ribu triliun untuk sektor energi karena teknologi energi baru terbarukan mahal. Padahal, Indonesia merupakan lumbung energi baru terbarukan. Akan tetapi, *structure market*-nya harus ditransformasi. Kita jangan berpikir bahwa energi baru terbarukan hanya untuk kepentingan bangsa saja, tetapi energi ini bisa juga kita ekspor. Kemarin, saya berbicara dengan *Minister for Sustainability and Environment* Singapore, Grace Fu. Beliau mengatakan bahwa Singapura mengimpor listrik dari Sarawak Malaysia, Thailand, dan Laos yang merupakan energi baru terbarukan. Kita sebenarnya negara *super power* di bidang *renewable energy*, baik *wind, solar, hydro*, atau *geothermal*. Pada *geothermal*, Indonesia mempunyai potensi di hampir 4 GW di kawasan hutan dan konservasi. Kalau itu bisa kita *tapping*, ini luar biasa untuk akselerasi transisi energi.

Berikutnya, kesadaran dan peduli tidak cukup. Kita lakukan bersama-sama. Pemerintah ingin bersama-sama dengan seluruh rakyat, termasuk anak-anak muda, untuk mewujudkan pencapaian bersama-sama. Saya kira ini *the most and the biggest capital that you have now*, Pak Dino.

Berbicara terkait angka global tadi, kalau kita konsentrasi saja pada melindungi lahan gambut — Indonesia has the largest tropical peatland in the world. Kita punya 13,4 juta hektar gambut. Jika kita berbicara *hydrological unit* gambut kita 24 juta hektar, di ekosistem gambut kita sekarang tersimpan 38-55 GtCO₂e. Angka ini jauh dari angka *net-zero* yang ditargetkan global yakni, sebesar 36 GtCO₂e.

Kita punya mangrove sebesar 3,14 juta hektar dengan *average* 1.000 ton per hektar. Itu artinya kita mempunyai 3 Giga ton lebih di mangrove. Dua ekosistem ini kita jaga, kita lindungi, sudah *means a lot*. Kita cegah emisi, dan kuatkan sequestrasinya. Tapi, membutuhkan *resource mobilization* Rp 4 ribu triliun. APBN kita hampir Rp 3 ribu triliun per tahun.

Dr. Dino Patti Djalal, Moderator:

Terima kasih, Pak Alue Dohong. Selanjutnya, saya beralih ke Ibu Mercy. Ibu Mercy, tadi Pak Alue Dohong membicarakan tentang *renewable energy* dan ini tantangan terbesar kita. Target kita ambisius, yakni 23% di tahun 2025, tetapi sekarang masih 11%. Ibu adalah orang yang paling bertanggung jawab karena di parlemen Ibu memimpin komite yang membahas RUU mengenai energi terbarukan dan saya tahu perdebatannya sangat alot. Tapi kami dari komunitas ingin menyatakan apresiasi karena Ibu meng-*handle* ini dengan penuh integritas dan kompetensi.

Saya ingin tanya. Apa masalahnya? Mengapa energi terbarukan sangat susah untuk kita dongkrak? Apa tantangannya?

Mercy Chriesty Barends, S.T., Panelis:

Berkaitan dengan apa tantangan yang dihadapi parlemen saat ini. Sesungguhnya berdasarkan UU MD3, kita punya lima tanggung jawab atau fungsi besar: (1) fungsi anggaran; (2) fungsi legislasi, atau pembuat undang-undang; (3) fungsi pengawasan; (4) fungsi konstituensi; dan (5) fungsi diplomasi antar-parlemen. Pertama, berkaitan dengan tantangan terbesar yang kita hadapi dalam rangka mempercepat pencapaian *net-zero emission*. Saya ada di Komisi VII dan didaulat oleh kawan-kawan menjadi Ketua dari *Green Economy Caucus*. Tantangan yang paling pertama hari ini adalah rezim fosil masih sangat kuat di parlemen kita. Kami yang ada di internal parlemen sendiri membahas tentang Undang-Undang Energi. Tadinya, UU tersebut bernama Undang-Undang Energi Terbarukan, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, dan berubah lagi menjadi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Prinsipnya, ada fondasi yang fundamental ingin kita bangun bahwa transisi energi tidak sekedar menjadi wacana dan gerakan sosial tanpa payung *legal standing*-nya. Jadi, harapan kami sebelum 2024 nanti, RUU ini sudah bisa kita sahkan. Sekarang sudah setengah jalan. Sampai dengan kemarin kita bahas, sudah di pasal sekian, membahas berkaitan dengan pemetaan fase transisi.

Ada *problem* besar dari *mix energy* kita saat ini; 62% berasal dari PLTU batu bara. Kalau ditotal dan ditambah dengan yang berbasis diesel dan lain-lain; total seluruhnya sekitar 85%. Tahun ini kita berupaya mencapai angka 15% dan sudah 14,7%. Harapan kita sampai dengan akhir tahun ini beberapa *scale up* energi terbarukan bisa *commissioning* dan kita bisa mencapai antara 15 - 17%. Artinya, menuju target kita di tahun 2025 untuk mencapai 23%, kita masih ada selisih kurang lebih 6 - 8%. Ini kerja keras dalam 2 tahun. Apakah ini masuk akal? Saya tidak tahu, ini harus kita jawab bersama. Tetapi hari ini kita *on-track*. Itu yang pertama dari sisi *legal standing* kita.

Berikutnya, turunan aturan-aturan main yang sementara menjadi *bridging* kebijakan sampai dengan undang-undang ini definitif. Pak Presiden telah mengeluarkan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kedua, angka percepatan transisi energi sudah keluar dengan Perpres yang kemarin dikeluarkan sesudah G20 di bulan Februari atau Maret kemarin. Ini berkaitan dengan *fit-in tariff* untuk melakukan percepatan dan membuat suasana *green investment* kita kondusif. Sepanjang tidak ada kebijakan yang bersifat insentif — baik insentif fiskal maupun non-fiskal — persoalan akan menjadi masalah baru karena lambat. Orang ingin menjadikan Indonesia sebagai *the heaven of green investment* akan sangat berat.

Cara pandang seluruh pemangku kebijakan terhadap Indonesia sulit. Sulit mengimplementasikan keadilan energi hijau yang berbasis seluruh kebijakan yang berbasis geografis kita saat ini. Untuk di Indonesia bagian barat dan tengah, kita hari ini *oversupply*. *Renewable energy* dan *large-scale investment* yang besar-besaran — dam, *hydropower*, *wind turbines*, dan seterusnya. Bagaimana dengan Indonesia bagian timur? Saya beri contoh. Bulan Mei kemarin, saya baru selesai *long course* di MIT dan salah satu *prototyping* yang saya bawa adalah membangun *renewable energy* yang berbasis daerah-daerah kepulauan. Selama ini masih berbasis kontinental, sementara kita punya 17 ribu pulau. Saya beri contoh kecil di Maluku. Maluku memiliki 1.342 pulau. Kalau seluruh anggota parlemen tidak punya cara pandang yang *clear* terhadap pulau-pulau ini, sangat mengerikan. Satu pulau kecil ditempatkan, misalnya, *green energy* seperti *solar cell photovoltaic* (PV), kurang lebih sekitar 75 kWp. Teknologi kita untuk panel-panelnya baru bisa sampai 5 tahun. Batre kita setiap 2 tahun ganti. Berapa anggaran setiap 2 - 5 tahun ini ganti? Sekitar Rp 2,5 miliar. Saya punya pertanyaan kecil. Apabila 17 ribu pulau ini, 10%-nya — 1.700 pulau — dikali Rp 2,5 miliar dan dikali setiap 5 tahun, berapa anggaran yang kita keluarkan untuk *renewable energy*? Kita harus cerdas mengelola *renewable energy* dengan kondisi yang paling faktual sesuai dengan yang ada di sekitar

kita. Apakah bisa dikelola seluruh sumber dana yang memungkinkan; Dana Desa, Dana ADD, dan dana transfer penugasan apapun, baik dari provinsi maupun pusat? Tetap tidak akan cukup karena setiap anggaran yang turun akan ada penurunan petunjuk pelaksanaan untuk pemanfaatan anggaran. Kita berupaya supaya dapat membantu masyarakat yang berada di wilayah 3T bisa mengakses keadilan energi hijau secara tepat.

Persoalan yang ketiga, terkait percepatan transisi energi, apakah peralihan untuk *phase-out* PLTU batubara ke *renewable energy* memungkinkan? Sangat memungkinkan. Apakah bisa cepat? Tidak bisa cepat. Mengapa? Total subsidi energi kita per tahun kemarin adalah Rp 552 triliun karena eksternalitas persoalan COVID-19 dan geopolitik Rusia-Ukraina. Tahun ini, subsidi menjadi sekitar Rp 330 triliun. Untuk tahun depan, saya belum bisa buka anggaran, namun angkanya berbeda tipis. Sepanjang tidak ada *treatment* yang *clear* terhadap *shifting* subsidi energi yang besar ini untuk mem-*back-up* dan ikut mensubsidi *renewable energy* secara struktural dan progresif, maka peralihan energi ini akan sangat lambat. Apa yang dilakukan oleh Komisi VII? Kita mendorong dan setengah memaksa, mendesak Kementerian ESDM, dan terutama PLN, untuk segera mengeluarkan *roadmap* transisi energi. *Roadmap*-nya saat ini sudah dikeluarkan untuk tahun 2045, 2050, dan tahun 2060. Tiga jenis *roadmap* ini kita minta untuk disimulasikan satu per satu kebutuhannya. Anggaran memang sangat besar; hampir Rp 4 ribu triliun. Jika kita pecah hingga tahun 2030, kurang lebih kita membutuhkan sekitar Rp 300 - 400 triliun per tahunnya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sinyal yang paling kuat dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan adalah percepatan implementasi *Energy Transition Mechanism* (ETM) melalui *blended finance*. Komisi VII dengan pihak-pihak terkait cari uang ramai-ramai. Tanpa ETM ini, kita tidak bisa bekerja banyak dengan bertumpu pada anggaran yang ada di batang tubuh APBN.

Dr. Dino Patti Djalal, Moderator:

Saya tahu bahwa Bappenas merupakan salah satu institusi yang paling awal melihat bahwa kita bisa tumbuh 6% sekaligus mengurangi emisi 44-45%. RPJMN juga digodok oleh Bappenas. Namun, yang dari Bappenas adalah sebuah *blueprint on paper*, pelaksanaan dan eksekusinya pasti berbeda karena tugas Bappenas merencanakan. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa pandangan dan strategi Bappenas dapat terlaksana apapun yang terjadi?

Dr. Vivi Yulaswati, Panelis:

Saat ini Indonesia, berdasarkan PDB, berada di posisi sebagai negara berpendapatan menengah atas. Sudah 30 tahun kita menduduki posisi negara *middle-income country*; mulai dari *lower* hingga *upper*. *Most likely*, suatu negara yang menduduki posisi tersebut lebih dari 30 tahun akan memasuki sebuah zona yang dinamakan *middle-income trap*. Kita tidak ingin itu. Jadi, kita punya mimpi dan visi besar, visi besar pada tahun 2045 — saat Indonesia 100 tahun kemerdekaan — lompat menjadi negara maju. Tentunya, kita perlu transformasi banyak hal, seperti ekonomi, sosial, tata kelola dan juga tentunya bersih. Kita harus tumbuh paling tidak 6% atau bahkan 7% *to achieve* 2045, sekaligus keluar dari *middle-income trap*.

Kalau kemarin kita bisa tumbuh tinggi dengan batubara yang murah; dan hitungannya bisa sampai 2060, kita sangat kaya dari sisi batubara. Tetapi, sekarang kita juga harus bersih. Paling tidak ada tiga rasional kenapa kita harus dekarbonisasi.

Pertama, saat ini kita mengenal apa yang disebut *triple planetary crisis*, yang pertama yakni *climate change*. Dampaknya sudah kita rasakan saat ini. Kedua adalah polusi. Jakarta, misalnya, adalah *the most polluted city in Southeast Asia*. Kemudian, kita juga sudah mulai kehilangan keanekaragaman

hayati, baik dari konservasi terestrial atau hutan, mangrove, dan juga di laut. Sudah terjadi kerusakan. Kita sangat besar potensinya untuk menyerap karbon. Algae kita di laut terbesar di dunia untuk menyerap karbon. Itu alasan pertama kenapa kita harus dekarbonisasi.

Kedua, seperti yang disampaikan oleh Bu Mercy, 80% darah pembangunan kita adalah *fossil-based*. Untuk beralih ke *renewable energy* juga tidak mudah. Beberapa tantangannya antara lain — misalnya kita bicara mengenai PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) — kita harus berhadapan dengan lahan. Kenapa kita tidak memanfaatkan kincir angin di laut? Teknologi memungkinkan. Kemudian, jika berbicara terkait *floating PV*, tetapi ternyata peraturannya baru boleh dimanfaatkan di danau dan juga laut sekitar 5%, karena untuk konservasi dan menjaga kualitas air.

Sekarang, semuanya sedang berproses, sehingga kedepannya *economic upscale* untuk *renewable energy* bisa terwujud. Tapi, kita harus belajar dari negara-negara lain, seperti Vietnam yang saat ini dihadapkan pergiliran listrik karena mereka *heavily-invested only in hydro*. Kedepannya, dengan potensi besar Indonesia dari berbagai sumber energi baru terbarukan, kita menginginkan akuisisi teknologi yang *most efficient*, tidak hanya untuk *renewable energy*, tetapi juga *new energy*. Kita juga membuka kapasitas kita membangun energi yang berbasis hidrogen karena kita kaya akan air. Kemungkinan kita juga membuka untuk energi nuklir, supaya kita sampai *net-zero* 2060, atau bahkan lebih cepat, 2050.

Alasan ketiga adalah komitmen. Tidak hanya Paris Agreement, tetapi *on the way* kita 2030 — kurang dari 7 tahun lagi — kita harus *achieving* dan memastikan tidak seorang pun tertinggal. Jadi jika kita berbicara transisi energi untuk daerah-daerah terpencil yang kaya akan batubara, kita juga harus *aware* terhadap bagaimana pemerintah daerah tidak mengurangi layanannya pada saat APBD-nya turun untuk masyarakat miskin, dan juga tentunya berbagai kualitas publik. Itulah kenapa kita berbicara transisi energi yang *just* atau adil.

Dr. Dino Patti Djalal, Moderator:

Terima kasih, Ibu Vivi.

Melissa Kowara dari Extinction Rebellion, *very passionate*. Melissa, kita sudah mendengar dari 2 instansi pemerintah dan dari parlemen. Bagaimana pandangan dari komunitas? Apa kira-kira regulasi, insentif, hal yang perlu digenjot?

Melissa Kowara, Panelis:

Sebagai warga sipil, krisis iklim ini memang sudah menjadi suatu masalah yang sangat besar, dimana kita bukan membicarakan lingkungan, hutan, melainkan kehidupan. Krisis iklim adalah krisis ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan segala aspek kehidupan kita. Yang sudah terjadi sekarang, ada jutaan orang yang hak asasi manusianya sudah terlanggar. Jadi ini bukan masalah 2050 atau 2045, bahkan ini masalah sekarang. Jadi jelas, jika ada situasi yang melanggar HAM, kita — termasuk negara — harus punya tanggung jawab untuk melakukan segala hal yang bisa dilakukan untuk keluar dari situasi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Saat ini, kita sudah banyak melihat komitmen dan regulasi. Terima kasih banyak. Tetapi memang masih tidak sejalan dengan *science* yang ada. *Net-zero* yang seharusnya dikatakan oleh para *scientist* dicapai paling terlambat pada tahun 2050, atau lebih cepat. Sedangkan kita masih di tahun 2060, atau sebelumnya. Bisa dibayangkan, di tahun 2060 kita sudah punah duluan.

Kita juga sudah tahu bahwa kita harus menurunkan emisi dari sekarang juga, tapi sayangnya NDC kita masih meningkatkan emisi hingga 2030. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena *IPCC Report* meminta kita menurunkan emisi dibandingkan tahun 2010. Jika kita melihat datanya tadi, dibandingkan dengan tahun 2010, kita masih akan meningkat 40-50%. Jadi kita masih relatif salah arah dari segi komitmen.

Forget about commitment, kita lihat aksi-aksinya. Banyak sekali hal-hal seperti pensiun dini PLTU batubara, tetapi kenapa kita masih memperbolehkan membangun PLTU batubara baru di tempat-tempat *captive*, seperti di Kaltara yang dibangun oleh Adaro. Kenapa kita mengatakan kita mau proteksi hutan mangrove dan banyak penanaman kembali, tetapi kita masih memperbolehkan memabat hutan mangrove yang ada, salah satunya untuk terminal LNG yang merupakan *fossil gas* di Bali? Lalu kenapa kita masih menjatahkan deforestasi hingga 6 juta hektar sampai tahun 2050, padahal kita tahu kita butuh meningkatkan stok hutan, bukan menurunkan? Masih banyak hal-hal yang tidak masuk akal, seperti program-program UU Cipta Kerja, UU Minerba, IKN, proyek 10 Bali Baru yang akan hanya menghancurkan lingkungan hidup kita jauh lebih banyak dan akan meningkatkan emisi besar-besaran. Ini tidak masuk akal untuk saya dan untuk banyak orang.

Ini generasi kita dan kita tidak bisa main-main, “*kita ganti datanya sedikit supaya kita terlihat selamat.*” Sains tidak seperti itu kerjanya. Kita menuju kehancuran ekosistem dan seluruh aspek kehidupan kita, tapi kita masih bermain dengan data dan kata-kata manis, tetapi belum tentu dikerjakan. Aku mengerti bahwa ini adalah kerja gotong-royong. Mengerti sekali. Aku setuju bahwa kita butuh kesadaran, keinginan, peduli, dan aksi, tapi mana informasi terhadap itu? Mana pendidikan iklim yang tersebar luas dimana-mana? Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dan bergotong-royong, kalau mereka tidak tahu ada masalah? Informasi ini sangat bisa disebarluaskan karena kita sudah melihat dalam kondisi pandemi dimana informasi soal pandemi disebarluaskan dimana-mana — *billboard*, sekolah, instansi pemerintah, di kantor-kantor, radio, TV. Mana informasi ini untuk krisis iklim? Mana sumber daya yang bisa membantu masyarakat untuk bisa bergotong-royong?

Terakhir, solusi sebenarnya ada banyak, dan kita bisa melihat semua bentuk solusi dari semua sektor yang ditemukan di komunitas, *grassroot*, instansi kecil. Akan tetapi, sampai sekarang, solusi-solusi yang didukung hanya berupa proyek besar-besaran, yang kecil malah tidak didukung, termasuk dengan program Kampung Iklim — saya suka sekali program Kampung Iklim yang mampu meningkatkan resiliensi dan kedaulatan di tingkat masyarakat — tetapi hal tersebut malah tidak diberikan sumber dana. Ini yang sangat penting untuk diubah.

Terakhir, seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, bahwa kita tidak boleh mengorbankan ekonomi. Tapi pada kenyataannya, ekonomi apa yang bisa kita nikmati jika kita hanya sibuk kabur dari satu bencana yang satu ke bencana yang lain. Tidak ada. Semuanya akan hancur karena pada akhirnya tidak ada Indonesia di planet yang mati. Jadi tolong kita memang harus untuk memobilisasi semua aspek, baik dari pemerintahan, aktivis, untuk mendorong adanya lebih lagi ambisi yang sesuai dengan sains untuk mengeluarkan kita dari situasi ini.

Mercy Christy Barends, S.T., Panelis:

Buat saya, ini memang kerja gotong-royong. Kita memang harus mencari *champion*, baik yang dari dalam sistem maupun yang di luar sistem. Yang di luar sistem, seperti kami yang di DPR RI, kita mencari *champion* juga dengan yang ada di pemerintah karena tidak semua orang mempunyai *mindset*

yang sama dengan kita yang ada di dalam forum ini. Ada orang yang memiliki perspektif rezim fosil. Ada orang yang masih punya perspektif untuk batu bara.

Pertama, saya ingin memberikan *insight*, berkaitan dengan *how to translate*, dari yang sifatnya wacana dan kebijakan, bisa turun sampai ke tingkat yang paling akar rumput. Selain dukungan dari berbagai kegiatan *extra-parliamentarian*, maupun NGO. Semua kebijakan yang ada di tingkat pusat, kalau kita berbicara strateginya, dokumennya, UU, semua lengkap dengan surat-surat, tidak ada yang tidak ada instrumennya. Semuanya ada.

Pertanyaan kedua, berapa banyak yang sudah turun hingga ke tingkat sub-nasional kebijakan, entah provinsi atau kabupaten/kota? Salah satu mitra yang ada di Komisi VII itu adalah Dewan Energi Nasional. Kita paksa, untuk di periode ini, mereka menolong semua provinsi untuk segera mengeluarkan kebijakan Rencana Umum Energi Daerah, sehingga kita bisa melihat berapa banyak masing-masing daerah mulai memetakan *mix energy*-nya. Jika tidak, tidak akan pernah bertemu antara di pusat dan daerah. Dari hasil yang terakhir, masih ada sekitar 9 provinsi yang masih dalam *ongoing process* untuk tahap pertama menyelesaikan seluruh Rencana Umum Energi Daerah (RUED), didalamnya termasuk kebijakan untuk energi terbarukan. Kedua, bagaimana dengan di tingkat desa? Kita sangat berharap bahwa kebijakan ini bisa turun, bukan hanya dari sisi kebijakan dan aturan mainnya, termasuk mengeluarkan seluruh kebijakan transisi energi sampai masuk di RPJMDES. Kita minta maaf, kadang-kadang ini agak instrumentasi. Tetapi jika ini tidak kita selesaikan, tidak ada kebijakan dan dana. Pemerintah desa, para lurah, dan sebagainya tidak akan mau bekerja untuk mengurus hal ini karena mereka bekerja berdasarkan apa yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan makro hingga turun.

Ketiga, bagaimana mendorong sampai di tingkat akar rumput ini sehingga bisa bekerja bersama-sama? Isu ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah dan parlemen semata. Ini tanggung jawab kita semua. Sudah tidak pada tempatnya lagi kita saling mencari kesalahan. Saat ini, kita mendorong penuh. Bapak Jokowi tidak main-main terhadap isu transisi energi, digitalisasi, dan dekarbonisasi ini, termasuk mendorong interkoneksi, atau yang saya maksud *smart-grid interconnection*. Semua yang kita bicarakan khusus di Komisi VII berkaitan dengan transisi energi. Semua *renewable energy* itu *intermittent*. Kalau tidak kita kembangkan teknologi untuk pemanfaatan CCS dan CCUS. Jadi, ini bergerak serempak dan begitu cepat. Semua ini bergerak di Komisi VII. Semua ini kita selesaikan satu per satu, sehingga tidak keluar dari rel.

Walaupun benar sekali. Tadi sudah saya buka di atas meja. Hari ini kita masih menggunakan 62% dari batubara karena kita ini sudah tandatangani sejumlah kontrak dari sebelum pemerintah Pak Jokowi. Tidak mungkin kita membatalkan kontrak tersebut, kalau tidak, kita bisa terkena arbitrase internasional dan harus membayar triliunan rupiah karena melanggar kontrak. Selesai tahun 2023 dan tahun seterusnya, kita berharap tidak ada lagi buka kontrak baru untuk batubara. Walaupun kemarin, kita di Komisi VII juga agak kecewa, ada 2 *large-scale investment* untuk batubara dari Kementerian BUMN. Kita berharap, antar-kementerian, tidak bisa lagi bekerja dengan ego sektoral dan bekerja sporadik. Sudah harus bekerja bersama-sama.

Terakhir adalah *capacity building*. Sejumlah anggaran di Kementerian ESDM, Bappenas, KLHK, dan anggaran yang lainnya. Pertanyaannya hari ini, yang melakukan eksekusi anggaran turun sampai ke bawah. Kami berharap ada *open gate* dan *side gate* dalam *channeling* ini, sehingga pihak *external organization* bisa mengakses anggaran juga.

Terakhir sebagai penutup, mengenai *carbon trading*. Saya sangat memohon kepada Kementerian LHK, *carbon trading is not for corporate interests only*. Mengapa? Dalam banyak sekali percakapan mengenai *carbon trading*, tadinya kita mengarahkan, untuk yang punya HPH besar, pemegang izin-izin yang besar, mereka melakukan dan memanfaatkan sejumlah lahan untuk *carbon trading* itu. Apa yang terjadi saat ini? Perusahaan-perusahaan baru dan fiktif dibuka, kemudian mencaplok hutan *mangrove* sampai dengan hutan dalam yang sangat luas; hutan rakyat. Rakyat jaga. Mereka yang berjualan di luar, menggunakan verifikator global — Verra, dll. — berjualan di pasar-pasar karbon dan mendapatkan uang banyak. Rakyat dapat apa? Jadi tolong, bantu kami juga. Ada 2 mekanisme untuk pemanfaatan yang berkaitan dengan *carbon trading*. Satu untuk kepentingan korporat, dan kedua untuk kepentingan rakyat harus dijaga.